

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas serta kaya akan sumber daya alam, tentunya memiliki potensi alam yang melimpah yaitu hasil pertambangan, pertanian, hingga sektor-sektor lainnya yang menjadi modal penting dalam memajukan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik dari segi materi maupun spiritual, guna mencapai sasaran nasional yang telah ditetapkan (Purwanti, 2023). Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang benar, adil dan merata (Purnamasari & Ma'ruf, 2022).

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan dorongan bersama seluruh rakyat untuk terus memperbaiki tingkat kesejahteraan dan kemakmuran secara adil serta merata. Dengan landasan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak sekaligus berkewajiban berperan aktif dalam upaya mencapai cita-cita bangsa di bidang pembangunan tersebut. Pembangunan Negara harus dilakukan secara merata baik wilayah terpencil sampai wiliayah besar, hal ini bisa dimulai dengan memperkuat daerah-daerah kecil dalam kerangka Negara kesatuan. Hal ini dipandang strategis untuk suatu langkah dalam menciptakan Negara yang makmur dan menjadi tonggak dalam

menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terendah dan sudah biasa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar membantu desa dalam mengurangi kemiskinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa merupakan aspek terpenting dalam mencapai target pembangunan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

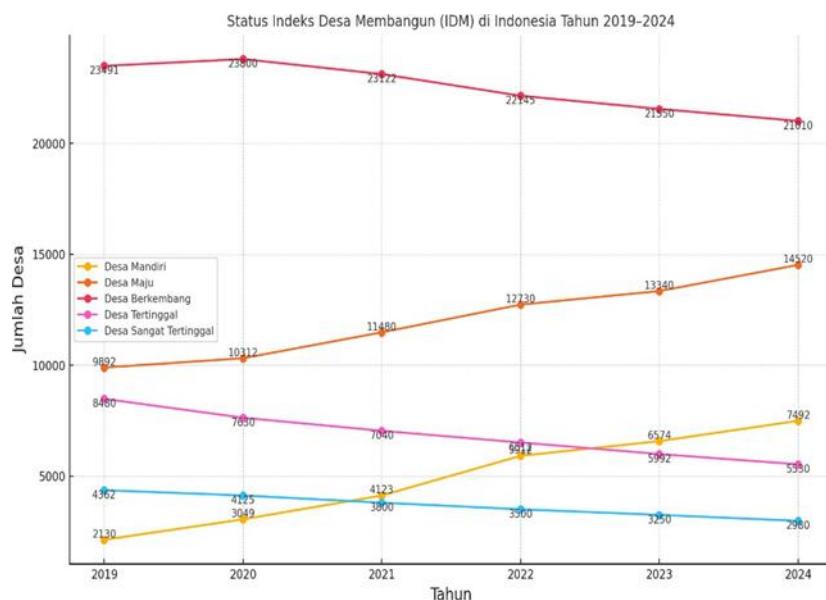
Salah satu indikator status negara berkembang di Indonesia dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Sari & Tukiman, 2023). Diantaranya penyebab kemiskinan adalah kesenjangan tingkat pendidikan, tingginya kebutuhan pokok, perbedaan akses sumber daya, dan distribusi pendapatan yang tidak merata akibat terbatasnya lapangan kerja. Menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2024, Penduduk Miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta atau 9,03 persen. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh daerah pedesaan sebesar 13,58 sedangkan kemiskinan di perkotaan berjumlah 11,64. Dapat dilihat berdasarkan angka kemiskinan di suatu wilayah menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara Desa dan Kota. Akibat rendahnya perekonomian oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan dengan program pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kemandirian dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan

dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri (Ristiana & Yusuf, 2020). Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperluas peluang, mendorong semangat, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat desa dengan memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur urusan mereka sendiri, guna mengembangkan potensi daerah secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, disarankan agar setiap desa memiliki organisasi komersial, atau lembaga usaha ekonomi yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan warga desa, khususnya dalam hal kebutuhan dasar dan pemanfaatan sumber daya yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa. Maksud peraturan tersebut adalah perwujudan memperbaiki kenyamanan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 memberikan pedoman untuk mencapai target pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu cara untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa adalah dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang membantu mengidentifikasi status desa dan menilai tingkat kemajuan serta kemandiriannya. Berdasarkan IDM, desa dikategorikan

dalam lima status: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal Dan Desa Sangat Tertinggal (Bachrudin & Darma, 2020). Berikut data status Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada tahun 2019-2024:



Gambar 1. 1 Data Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada Tahun 2019-2024

Sumber : Kemendesa, 2025

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa desa dengan status IDM sebagai desa berkembang mendominasi dari tahun 2019 hingga 2024. Selama periode ini, jumlah desa mandiri dan desa maju terus meningkat setiap tahun, sementara kategori desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal mengalami fluktuasi. Dalam upaya memperkuat perekonomian lokal, Pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memaksimalkan potensi lembaga, sumber daya alam, dan tenaga kerja lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperkuat peran desa melalui forum Musyawarah Desa (Sugiarta, 2023). Dengan membentuk BUMDes, diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi desa secara lebih efektif dan

menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan desa.

BUMDes berperan sebagai lembaga sosial dan unit usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa (Fitriyanti, 2019). Pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat melalui BUMDes mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi desa. Sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 BUMDes didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan pengelolaan dan kepemilikan modal secara bersama. BUMDes menjadi wadah kerja sama pemerintah desa dan warga untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan manajemen yang baik, BUMDes diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata.

BUMDes mendukung program pembangunan desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mengatur pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi, serta penyediaan layanan publik, serta untuk kemakmuran penduduk desa dapat menyediakan bentuk usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 174 Tahun 2023, tercatat 2.800 desa berstatus mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa berkembang. Hal ini sejalan dengan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai BUMDes pada tahun 2023 di artikel suara surabaya.net diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait BUMDes sebagai berikut:

“Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk 6.490 BUMDes, terdiri dari 1.400 BUMDes kategori maju, 2.353 kategori berkembang, dan 2.737 kategori pemula. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun dan

memberdayakan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.”(Sumber:<https://www.suarasurabaya.net/kelanalokota/2023/jatim-punya-2800-desa-mandiri-tertinggi-di-indonesia/> [Di akses pada tanggal 1 Juli 2025])

Berdasarkan berita tersebut, keberadaan BUMDes bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kemandirian desa. BUMDes berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Diharapkan, hal ini dapat mendukung pembiayaan pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun setiap tahun, serta berkontribusi pada perekonomian desa melalui berbagai unit usaha yang dikelola. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes sudah semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat melalui penyedia barang dan jasa atau wadah dalam mencari keuntungan. Kehadiran BUMDes bisa mewujudkan desa lebih mandiri selaku lembaga yang menampung dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa melalui aktivitas perekonomiannya berdasarkan ciri dan karakteristik khas (Tyas & Hertati, 2023). Oleh sebab itu, terdapatnya BUMDes di setiap Kabupaten/Kota dapat berkembang dan membenahi ekonomi desa dengan berbagai unit usaha desa yang dikelolanya, sehingga bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah/desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contohnya adalah Kabupaten Gresik, di mana sebagian besar wilayahnya berupa kawasan pedesaan dan penduduknya bermukim di desa. Kondisi tersebut membuat mayoritas masyarakat setempat bekerja di sektor

pertanian karena lingkungan alamnya masih mendukung. Namun demikian, sekitar dua pertiga penduduk di negara-negara berkembang masih tergolong miskin dan menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan pertanian, baik sebagai petani kecil maupun buruh tani dengan pendapatan yang rendah (Hamid, 2018). Keadaan ini juga tercermin dalam data BPS, yang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 naik sebesar 0,9 persen dan kembali meningkat 0,11 persen pada tahun 2024. Fenomena tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencari strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang lebih optimal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pendirian BUMDes di Provinsi Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Gresik adalah langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2024, yang menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Tujuan RPJMD ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan dengan mengembangkan kelompok usaha ekonomi dan menambah jumlah BUMDes yang aktif beroperasi. Daftar BUMDes di Kabupaten Gresik berdasarkan kecamatan dapat dilihat melalui Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Daftar BUMdes Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa		
		Kelurahan	Desa	BUMDes
1.	Balongpanggang	-	25	15
2.	Benjeng	-	23	13
3.	Bungah	-	22	22
4.	Cerme	-	25	25
5.	Driyorejo	-	16	16
6.	Duduk Sampeyan	-	23	23
7.	Dukun	-	26	26
8.	Gresik	16	5	5
9.	Kebomas	10	11	11
10.	Kedamean	-	15	15
11.	Menganti	-	22	22
12.	Manyar	-	23	23
13.	Panceng	-	14	14
14.	Sangkapura	-	17	17
15.	Sidayu	-	21	21
16.	Tambak	-	13	13
17.	Ujung Pangkah	-	13	13
18.	Wringinanom	-	16	17
Jumlah		26	330	298

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terdapat 330 desa yang terdaftar dan 298 memiliki BUMDes. Dalam perkembangannya, BUMDes diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan kemajuan yakni Pemula, Berkembang dan Maju. Akan tetapi, tidak semua desa di Provinsi Jawa Timur memiliki BUMDes yang benar-benar berhasil dikembangkan serta dimanfaatkan bagi keperluan desa secara maksimal. Hal ini menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mengembangkan BUMDes. Komisi I DPRD Gresik memberikan pernyataan kondisi riil lapangan yang dimuat dalam (Radargresik.id, 2025) bahwa :

“Data yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Terdapat kesenjangan antara data yang tercatat dengan situasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi yang ada dan kondisi riil masyarakat. Salah satu topik utama yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah kinerja BUMDes yang dianggap belum optimal. Menurut Rizaldi, banyak BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang belum mampu mengelola potensi ekonomi desa dengan efektif. 'BUMDes seharusnya menjadi pendorong utama ekonomi desa, tetapi banyak yang belum memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal,' ujarnya. Rizaldi juga menambahkan bahwa sektor-sektor potensial di desa masih belum dikelola secara profesional oleh BUMDes. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Komisi I DPRD Gresik, mengingat desa-desa menerima alokasi dana setiap tahunnya, yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Namun, hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi harapan.” (Sumber:https://radargresik.jawapos.com/politikpemerintahan/835219756/evaluasi-sektor-pemerintahan-desa-begini-rekomendasidprd-gresik-untuk-optimalisasi-bumdes#google_vignette). [Diakses pada 1 Juni 2025]

Jumlah BUMDes yang mendapatkan kategori maju pada Kecamatan Manyar ialah sebanyak 23 BUMDes yang sudah mencakup semua total desa yang ada di Kecamatan Manyar. Salah satunya yakni Desa Sukomulyo yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama BUMdes Maju Makmur Sejahtera Global pada tahun 2016. Pendirian BUMdes ini diperkuat dengan Peraturan Desa Sukomulyo No. 5 Tahun 2018 mengenai pendirian dan pengelolahan BUMdes.

Desa Sukomulyo merupakan salah satu desa yang tengah mengembangkan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. BUMDes ini memiliki berbagai unit usaha yang dikelola dengan tujuan untuk membuka

lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberian modal usaha, maupun pelatihan-pelatihan keterampilan. Desa Sukomulyo yang terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro.

BUMdes Maju Makmur Sejahtera Global terdiri dari 3 unit usaha. Yang pertama yakni HIPPAM (Himpunan Pengusaha Air Minum). HIPPAM merupakan unit usaha BUMdes pertama yang didirikan oleh Pemerintah Desa Sukomulyo. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) Desa Sukomulyo merupakan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang dibentuk sebagai upaya untuk mengelola kebutuhan air bersih masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, HIPPAM Desa Sukomulyo memanfaatkan sumber air artesis yang dihasilkan melalui pengeboran sumur dalam ke lapisan akuifer artesis. Keberadaan HIPPAM ini menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga masyarakat Desa Sukomulyo, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh layanan PDAM.

Kedua yakni unit simpan pinjam yang bernama Koperasi Desa Sukomulyo yang merupakan unit usaha yang dibentuk untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan, gotong royong, dan ekonomi kerakyatan. Koperasi di Desa Sukomulyo berfungsi sebagai wadah bagi

warga desa untuk saling membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, baik dalam bentuk simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan pokok, maupun jasa pendukung lainnya.

Ketiga yakni unit wisata yang terdiri pasar kuliner dan usaha UMKM. Pasar kuliner merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta memaksimalkan potensi lokal. Pasar ini bertujuan untuk membuka peluang usaha bagi warga, khususnya pelaku usaha mikro, ibu rumah tangga, dan pemuda desa agar dapat menambah penghasilan melalui penjualan produk makanan dan minuman lokal. Selain menjadi pusat penjualan aneka makanan dan minuman, pasar kuliner Desa Sukomulyo juga berfungsi sebagai sarana promosi produk unggulan desa, tempat berkumpulnya masyarakat, serta ruang interaksi sosial. Dalam hal ini Desa Sukomulyo memiliki beberapa program wirausaha yang dimana hasil dari kegiatan tersebut menjadi beberapa produk unggulan desa, yakni olahan kerupuk ikan Lele, manisan buah Kelengkeng dan kebun Markisa, Batik Ecoprinting , dan makanan olahan pisang dengan merk Sang Vendis. Menariknya, desa ini terpilih sebagai bagian dari program Desa Brilian (Desa Berkembang, Berkualitas, Inovatif, dan Amanah), sebuah program pembinaan desa dari Bank BRI yang bertujuan mencetak desa-desa unggul dan mandiri. Program ini menekankan pada inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan potensi lokal yang diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Pada tahun 2023 Desa Sukomulyo menjadi pemenang Desa Pengembangan Wirausaha terbaik dalam program Desa Brilian 2023. Program

“Desa BRILIAN” merupakan program inkubasi desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG’s. Iskandar dalam (Putra Jaya et al., 2023). mengatakan bahwa program desa brilian menjadi upaya mewujudkan ekonomi desa tangguh. Untuk mengikuti kompetisi Desa BRILian Indonesia 2023, Desa Sukomulyo membawa 5 program unggulannya yakni wirausaha olahan kerupuk ikan Lele, wirausaha manisan buah Kelengkeng dan kebun markisa, wirausaha Batik Ecoprinting dan wirausaha makanan olahan pisang dengan merk Sang Vendis.



Gambar 1. 2 Penerimaan Penghargaan Pengembangan Wirausaha Terbaik 2023

Sumber : <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/834051432/lima-program-unggulan-yang-bikin-desa-sukomulyo-gresik-raih-penghargaan-nugraha-karya-desa-brilian-2023> [Diakses pada 2 Juni 2025]

Di Desa Sukomulyo, seluruh lahan yang tersedia, baik milik desa maupun milik warga, dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa bersama warga mengembangkan kebun pisang, kebun kelengkeng, markisa, hingga kolam budidaya ikan lele di lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan lahan ini

tidak hanya berfokus pada panen hasil pertanian atau perikanan semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan produk olahan bernilai tambah. Dalam hal ini, kelompok ibu-ibu PKK Desa Sukomulyo berperan aktif sebagai penggerak pengolahan hasil kebun dan kolam menjadi berbagai produk siap jual, seperti keripik pisang, minuman sari markisa, hingga kerupuk ikan lele. BUMDes berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pengelolaan usaha, mulai dari pengumpulan bahan baku hasil kebun, proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran produk ke masyarakat luas. Dengan sinergi antara penyediaan lahan produktif oleh desa, pengolahan produk oleh ibu-ibu PKK, dan pengelolaan usaha oleh BUMDes, tercipta sistem ekonomi sirkuler di Desa Sukomulyo. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa BUMDes Maju Makmur Sejahtera Global berperan penting sebagai lembaga pengelola dan penggerak usaha desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar, Subiyanto saat meraih Penghargaan Nugraha Karya Desa BRILian 2023 dalam berita yang dimuat dalam website radargresik.id:

“Di desa kami ini tidak ada lahan terbengkalai. Semua lahan baik milik desa maupun milik warga menjadi produktif karena ditanami pisang, kelengkeng, markisa hingga kolam lele yang bisa dipanen setiap periode tertentu. Hasil dari panen inilah yang kamiolah menjadi suatu kegiatan perekonomian baru di desa sehingga tercipta sirkuler ekonomi,” (Sumber : <https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/834051432/lima-program-unggulan-yang-bikin-desa-sukomulyo-gresik-raih-penghargaan-nugraha-karya-desa-brilian-2023?page=2> [Diakses pada 1 Juni 2025]

Penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan desa dalam mengelola unit usaha secara lebih baik. Selain itu, penghargaan ini menunjukkan kemajuan

signifikan dalam memberdayakan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama BUMDes untuk menciptakan sumber ekonomi lokal yang baru (Farid, 2021). Ketika pemberdayaan masyarakat dilakukan perlunya memperhatikan hal-hal penting, menurut Mardikanto & Soebianto (2017:114) merumuskan adanya (1) Bina Manusia, ialah mengutamakan terciptanya kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kualitas hidup. Seperti: penguatan dan pengembangan kapasitas individu, kelembagaan dan kapasitas jejaring. (2) Bina Usaha, yakni melibatkan pemilihan jenis usaha, pendirian badan usaha serta pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung. (3) Bina Lingkungan, khususnya upaya untuk melindungi, pelestarian lingkungan hidup maupun sumber daya alam. (4) Bina Kelembagaan, yakni penguatan penyediaan kelembagaan atau organisasi sosial agar dapat berjalan secara efektif membantu terselenggaranya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Berdasarkan keempat rumusan tersebut, BUMDes Maju Makmur Sejahtera Global mengalami beberapa kendala yang menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha dan pelaksanaan program pemberdayaan yang dilaksanakan di desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan dalam dimensi Bina Manusia dan Bina Usaha belum berjalan secara optimal. Bina Manusia sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, kelembagaan, serta jejaring sosial. Kegiatan pelatihan sejatinya dirancang untuk

mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing sumber daya manusia desa agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Namun demikian, meskipun pelatihan telah rutin dilakukan, namun implementasi hasil pelatihan di tingkat masyarakat belum maksimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lailatul selaku sekretasi BUMDes yang menerangkan bahwa :

“Dulu itu sudah banya pelatihan yang sering dilakukan di desa, tapi ya begitu namanya orang desa ya mbak kalau belum kelihatan hasil itu nggamau tapi kalau hasilnya sudah kelihatan baru partisipasinya kelihatan, susah diajak babat alas dulu. Dan juga meskipun pelatihan sudah dilaksanakan itu tidak ada tindak lanjut yang memadai pelaksanaannya jadi kurang berjalan optimal dan tidak berlanjut secara efektif mba.” (Hasil Wawancara 2 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang sudah dilakukan peneliti, kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan memang rutin dilakukan, namun pesertanya masih terbatas pada kelompok tertentu seperti anggota PKK atau pengurus aktif desa. Berikut merupakan kegiatan pelatihan yang sudah diadakan di Desa Sukomulyo:

Tabel 1. 2 Jenis Kegiatan Pelatihan dan Jumlah Partisipasi

No.	Jenis Kegiatan Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Olahan Pisang (Keripik Pisang)	25
2.	Pelatihan Desain Kemasan Produk	30
3.	Pelatihan pembuatan video kreatif Desa Wisata	15
4.	Pelatihan pengemasan dan produk UMKM	35
5.	Pelatihan Eco Print	20
6.	Pelatihan Olahan hasil perkebunan	25
7.	Sosialisasi sistem pembayaran digital (Qris&EDC)	30

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan data BUMDes Sukomulyo, 2025

Salah satu contohnya yakni dalam sosialisasi dan pelatihan eco print, pelatihan ini ditujukan kepada komunitas Batik Eco Print dan Ibu-ibu PKK Desa Sukomulyo, yang dimana seharusnya diikuti oleh seluruh anggota komunitas dan

Ibu-Ibu PKK namun kegiatan ini hanya di ikuti oleh pengurus aktif saja. Pelatihan eco print menjadi salah satu kegiatan penting yang rutin dilakukan karena produk utama dari unit usaha wisata di Desa Sukomulyo berupa batik eco print. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan kualitas dan variasi produk agar tetap memiliki daya saing di pasaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi yang dapat menghambat upaya pengembangan keterampilan masyarakat serta keberlanjutan kegiatan usaha batik eco print di Desa Sukomulyo.



Gambar 1. 3 Pelatihan Eco Print tahun 2025

Sumber : BUMDes Sukomulyo, 2025

Selanjutnya, dalam aspek kedua Bina Usaha, salah satu permasalahan yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan dimensi bina usaha di Desa Sukomulyo adalah keberadaan pasar kuliner yang tidak beroperasi secara konsisten. Meskipun telah dibentuk sebagai salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, pasar kuliner tersebut sering kali tutup dan tidak mampu menjadi sarana pemasaran yang efektif bagi produk-produk UMKM lokal. Sedangkan tujuan didirikannya Pasar Kuliner di Desa Sukomulyo adalah untuk menambah penghasilan masyarakat melalui penjualan produk makanan dan minuman lokal.

Selain menjadi pusat penjualan aneka makanan dan minuman, Pasar Kuliner Desa Sukomulyo juga berfungsi sebagai sarana promosi produk unggulan desa, sehingga apabila pengelolaan dan keaktifan pedagang tidak optimal, tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan unit usaha desa menyebabkan potensi ekonomi desa yang seharusnya tumbuh menjadi stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan manajemen operasional unit usaha masih perlu dibenahi secara serius agar mampu mendukung kegiatan ekonomi desa secara berkelanjutan.



Gambar 1. 4 Kondisi Pasar Kuliner Desa Sukomulyo, 2025

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025

Pada aspek ketiga, yaitu Bina Lingkungan, program pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan Wisata Apung Damar Segaran Global (Wadasglow) mencerminkan upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara produktif. Bina Lingkungan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan fisik, tetapi juga mencakup strategi pemanfaatan ruang dan potensi alam secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Telaga desa yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal kini diubah menjadi kawasan wisata yang menggabungkan fungsi edukasi,

rekreasi, dan kuliner, dengan tetap mempertahankan nilai ekologisnya. Melalui kegiatan seperti budidaya ikan, pembuatan kolam pancing, dan pembangunan warung terapung, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, kelestarian air telaga, serta tata kelola lingkungan wisata. Desa Sukomulyo saat ini memiliki lingkungan yang cukup baik, dan penting bagi masyarakat untuk menjaga keasrian dan merawat lingkungan tersebut. Khususnya di area wisata sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.5 dibawah ini :



Gambar 1. 5 Kondisi Lingkungan Area Wisata ApungDamar Segaran Global (Wadasglow)

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2025

Aspek yang keempat adalah bina kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap berjalannya seluruh kegiatan yang terkait dengan manusia, usaha dan lingkungan. Kelembagaan yang efektif menjadi penentu keberhasilan dari tujuan awal pembentukan lembaga. BUMDes Maju Makmur Sejahtera Global dalam hal ini merupakan sebuah lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk rakyat sebagai upaya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat seringkali mengacu pada penguatan perekonomian sebagai bentuk pengentasan kemiskinan, namun pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dalam menciptakan kemandirian desa. Hal ini memberikan dampak positif bagi berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Maju Makmur Sejahtera Global Melihat beberapa kendala yang ada pada BUMDes saat ini perlunya penguatan kelembagaan atau organisasi sosial untuk terus memantau dan mengedukasi agar berjalan efektif untuk dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

Mengacu pada isi dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka hal ini menarik penulis untuk melalukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Maju Makmur Sejahtera Global Di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Sejahtera Global di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Sejahtera Global di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penlitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah dijelaskan, lalu dapat diuraikan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Sejahtera Global khususnya dalam konteks pengelolaan ekonomi lokal dan pembangunan desa.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang Administrasi Publik khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes
2. Manfaat bagi pihak Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa Balongpanggang adalah penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Maju Makmur Sejahtera Global.
3. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan BUMDes.